



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H.M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDIANTO, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA,

(IDIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,

(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	80
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.396.680.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.519.751.000
Jumlah		Rp. 8.916.431.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Medan, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA,
(DIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TABANULI UTARA
(DONNY RITONGA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 16 April 2025

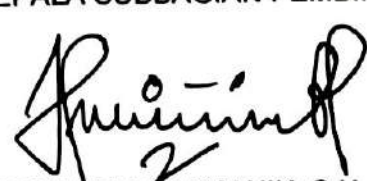
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,

(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)



Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	50
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 44.200.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 7.265.551.000
3	Layanan Sarana Internal	Rp. 210.000.000
Jumlah		Rp. 7.519.751.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 16 April 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(DONNY KRITONGA, S.H., M.H.)



(FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
TAPANULI UTARA,

(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(DAVID, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 40.600.000
2	Pemusnahan barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 18.000.000
3	Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 31.400.000
Jumlah		Rp. 90.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,



(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H)

(DAVID, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025 ?

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,
(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	100
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	5.0

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	Rp.32.670.000
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	Rp. 350.900.000
3	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 15.000.000
4	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9.264.000
Jumlah		Rp. 407.834.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	-
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp.30.000.000
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000
3	Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
4	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000
5	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000
6	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38.976.000
7	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52.400.000
Jumlah		Rp. 269.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,
(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,

(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,

(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	melalui jalur perdata		
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	34
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4.0

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
3	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 13.200.000
4	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 6.000.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000
Jumlah		Rp.80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,



UTARA,
(DONNY H. RITONGA, S.H., M.H.)



(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

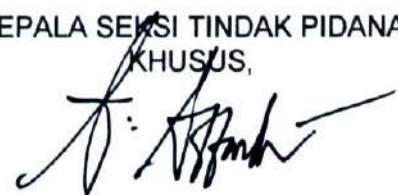
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 16 April 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA,
(DONNY K. RITONGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	85
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	80
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	85

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	85

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 92.082.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 206.000.000
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	Rp. 239.900.000
4	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11.080.000
Jumlah		Rp. 549.062.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Untuk mendukung visi Kejaksaan RI yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tugas pokok bidang tindak pidana khusus:

- Memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, TPPU, serta tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai, pajak, dan lain-lain) secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara melalui optimalisasi penanganan perkara pidana khusus.
- Mendukung agenda reformasi hukum nasional melalui penegakan hukum pidana khusus yang berkeadilan, humanis, dan berbasis HAM.
- Mendorong sinergi lintas sektor untuk pemberantasan tindak pidana khusus guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan peran intelijen penegakan hukum dalam deteksi dini dan pencegahan tindak pidana khusus.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 16 April 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULUTARA,
(DONNI R. RITONGA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VENPRI LUMBANTOBING, S.H.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

(FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

(VENPRI LUMBANTOBING, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	50
3	Meningkatnya realisasi PNBP	Persentase realisasi PNBP sesuai atau melebihi target PNBP	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Terselesainya layanan kepegawaian untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.	Persentase kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	90

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 44.200.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 7.265.551.000
3	Layanan Sarana Internal	Rp. 210.000.000
Jumlah		Rp. 7.519.751.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

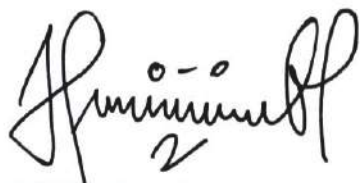
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

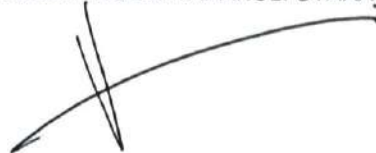
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,



(FERNANDUS DAMANIK, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,



(VENPRI LUMBANTOBING, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CHANDRA DERI TOGAR HABEAHAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA,

(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

(CHANDRA DERI TOGAR HABEAHAN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	34
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4.0

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000
2	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 13.200.000
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 6.000.000
4	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000
Jumlah		Rp. 50.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA



(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)



(CHANDRA DERI TOGAR HABEAHAN, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R Y MALONDO SITORUS, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA,

(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA

(R Y MALONDO SITORUS, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
Jumlah		Rp. 30.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

(ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H.)

(R Y MALONDO SITORUS, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENDI UTAMA SEMBIRING, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

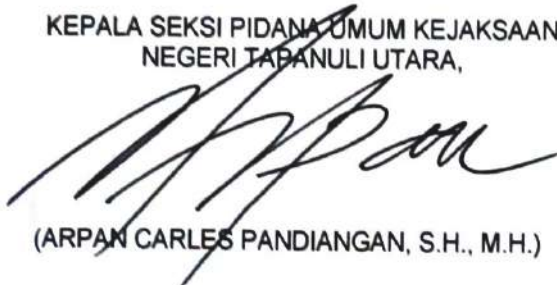
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

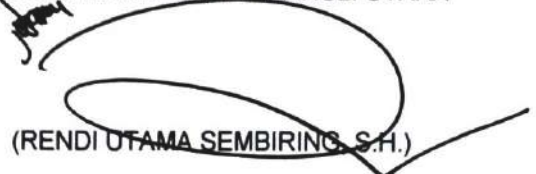
KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,



(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA



(RENDI UTAMA SEMBIRING, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	5.0

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	Rp.32.670.000
Jumlah		Rp. 32.670.000

D. PRIORITAS NASIONAL

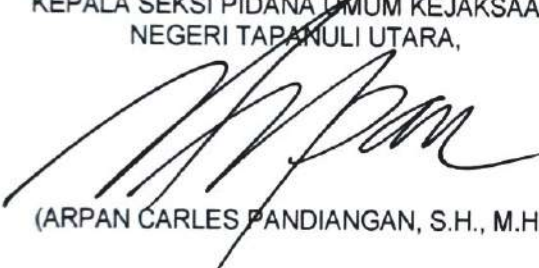
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

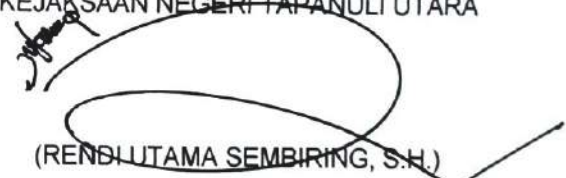
KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,



(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA



(RENDI UTAMA SEMBIRING, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GINDO BASTHIAN PURBA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN DAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA


(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)


(GINDO BASTHIAN PURBA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100
2.	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	100
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	5.0

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri	Rp. 350.900.000
2	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 15.000.000
3.	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9.264.000
Jumlah		Rp. 375.164.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN DAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA



(ARPAN CARLES PANDIANGAN, S.H., M.H.)



(GINDO BASTHIAN PURBA, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDREA CRYSTOPER SILALAH, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA

(ANDREA CRYSTOPER SILALAH, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100
5.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp.30.000.000
2	Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
3	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000
4	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000
5	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38.976.000
	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52.400.000
	Jumlah	Rp. 229.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

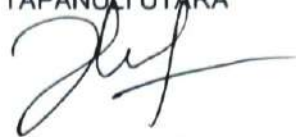
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,



(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA



(ANDREA CRYSTOPER SILALAH, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI SETIAWAN PUTRA SITORUS, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

(BUDI SETIAWAN PUTRA SITORUS, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100
2	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000
Jumlah		Rp. 40.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

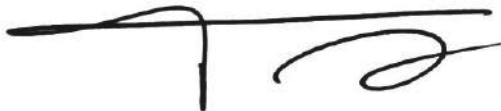
Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA,

KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI
UTARA



(MANGASITUA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)



(BUDI SETIAWAN PUTRA SITORUS, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID TAMBUNAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN
OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,

(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA

(DAVID TAMBUNAN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	85
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	80
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	85

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 92.082.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 206.000.000
Jumlah		Rp. 298.082.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Untuk mendukung visi Kejaksaan RI yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tugas pokok bidang tindak pidana khusus:

- Memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, TPPU, serta tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, pajak, dan lain-lain) secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara melalui optimalisasi penanganan perkara pidana khusus.
- Mendukung agenda reformasi hukum nasional melalui penegakan hukum pidana khusus yang berkeadilan, humanis, dan berbasis HAM.
- Mendorong sinergi lintas sektor untuk pemberantasan tindak pidana khusus guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan peran intelijen penegakan hukum dalam deteksi dini dan pencegahan tindak pidana khusus.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 01 Januari 2025

Pihak Kedua,

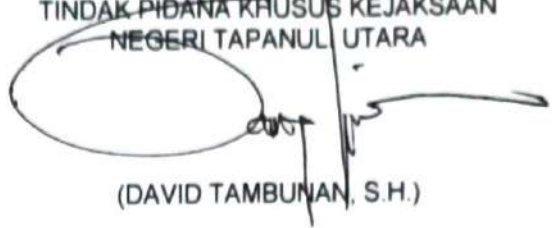
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,



(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI TAPANULI UTARA



(DAVID TAMBUNAN, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA BASAULI LUMBANTOBING, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarutung, 13 Maret 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,

(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA
HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

(IRA BASAULI LUMBANTOBING, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN
EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI
TAPANULI UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan		90	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi		85	

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	Rp. 239.900.000
2	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11.080.000
Jumlah		Rp. 250.980.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Untuk mendukung visi Kejaksaan RI yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tugas pokok bidang tindak pidana khusus:

- Memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, TPPU, serta tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai, pajak, dan lain-lain) secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara melalui optimalisasi penanganan perkara pidana khusus.
- Mendukung agenda reformasi hukum nasional melalui penegakan hukum pidana khusus yang berkeadilan, humanis, dan berbasis HAM.
- Mendorong sinergi lintas sektor untuk pemberantasan tindak pidana khusus guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- Mengoptimalkan peran intelijen penegakan hukum dalam deteksi dini dan pencegahan tindak pidana khusus.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tarutung, 13 Maret 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA,



(FRANS AFFANDHI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA
HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA



(IRA BASAULI LUMBANTOBING, S.H.)